

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

United States Agency for International Development (USAID) adalah lembaga donor pemerintah Amerika Serikat (AS) yang mengemban tanggungjawab untuk mengelola bantuan luar negeri AS. Lembaga yang dibentuk pada tahun 1961 oleh Presiden John F. Kennedy ini bertujuan mempromosikan pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial ke seluruh penjuru dunia.¹ Eksistensi USAID dalam ranah bantuan luar negeri selama lebih dari 5 dekade tentu tidak dapat diragukan lagi, dimana telah banyak kontribusi yang diberikan USAID dalam mendorong terwujudnya pembangunan di negara-negara berkembang maupun kurang berkembang. Saat ini, terhitung lebih dari 100 negara telah menjalin kerjasama dengan USAID dan lebih dari 200 proyek pembangunan tengah didanai oleh USAID.²

Di Benua Afrika, Ethiopia adalah salah satu negara yang tengah menjalin kerjasama cukup intensif dengan USAID. Ditandai pada tahun 2003, bantuan luar negeri dari USAID ke Ethiopia meningkat cukup signifikan dengan jumlah 606 juta dolar AS. Kemudian bantuan USAID

¹ “*USAID History*,” USAID, diakses dari <https://www.usaid.gov/who-we-are/usaids-history>, pada tanggal 10 Maret 2016.

² “*Where We Work*,” USAID, diakses dari <https://www.usaid.gov/where-we-work>, pada tanggal 1 Juni 2016.

secara perlahan dan stabil terus mengalir ke Ethiopia dengan rata-rata bantuan yang masuk sejumlah 500 juta dolar per tahun.³ Selain itu Ethiopia juga mulai mengalami pertumbuhan ekonomi riil yang cukup kuat dan luas pasca meningkatnya bantuan luar negeri yang masuk pada tahun 2003, yaitu dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sejumlah 10,6 persen per tahun selama 2004 hingga 2011.⁴ Bagi Ethiopia, sebuah negara yang baru saja naik kelas menjadi negara berkembang dan tengah berambisi mencapai *Millenium Development Goals* pada tahun 2020 tentu bantuan luar negeri adalah paket bantuan yang sangat dibutuhkan.

Dalam soal penerimaan bantuan luar negeri, Ethiopia adalah negara non-perang yang selama beberapa tahun tercatat sebagai penerima bantuan luar negeri AS tertinggi di benua Afrika.⁵ Bantuan luar negeri USAID ke Ethiopia umumnya berfokus untuk menanggulangi terjadinya bencana kelangkaan pangan, kelaparan, dan kemiskinan. Selain itu, sebagai mitra strategis AS dalam perang global melawan terorisme, Ethiopia juga mendapatkan dana bantuan untuk pelatihan militer, termasuk pelatihan dalam isu-isu terkait hukum perang dan ketaatan hak asasi manusia.⁶

³ “*Foreign Aid Explorer Trends: Ethiopia*,” USAID, diakses dari <http://explorer.usaid.gov/aid-trends.html>, pada tanggal 1 Juni 2016.

⁴ The World Bank, *Country Partnership Strategy for the Democratic Republic of Ethiopia*, Report no 71884-ET, 2012, hal.3.

⁵ Walau menyandang predikat “negara non-perang”, Ethiopia sebenarnya adalah rekan strategis AS dalam mengatasi ancaman-ancaman terorisme yang terjadi di kawasan Tanduk Afrika. Lihat American Foreign Policy Council, *World Almanac of Islamism: Ethiopia*, AFPC, 2013, hal.2-3.

⁶ International Business Publications, *Ethiopia Country Study Guide: Volume I Strategic Information and Developments*, IBP, Washington, 2009, hal.28.

Bantuan luar negeri USAID terus mengalir dan terealisasi dalam berbagai program pembangunan di Ethiopia. Salah satunya dalam sebuah program pembangunan nasional Ethiopia bernama *Growth Transformation Plan* (GTP). Dalam program pembangunan yang dicanangkan pemerintah Ethiopia pada tahun 2010 ini, bantuan USAID nampaknya menjadi amunisi penting guna mendukung terealisasinya GTP dimana Ethiopia mendapat bantuan dari USAID sebesar 813,8 juta dolar AS. Bantuan dari USAID tersebut adalah yang terbesar di antara lembaga donor yang lain, dan mewakili 35% dari total bantuan luar negeri yang masuk ke Ethiopia pada tahun anggaran 2010/2011. Pentingnya dukungan USAID dalam proses pembangunan di Ethiopia juga ditegaskan oleh Ato Sileshi Getahun (Menteri Sumber Daya Alam Ethiopia). Dalam sebuah acara loka karya pembangunan di Addis Ababa, Getahun berkata, “administrasi pertanahan akan terus menjadi fokus area pembangunan *Growth Transformation Plan* untuk pemerintah Ethiopia ... dukungan dari USAID serta mitra pembangunan lainnya untuk menjalankan administrasi pertanahan dan sertifikasi proyek ... adalah hal yang terpenting.”⁷

Dalam program pembangunan GTP 2010-2015, pemerintah Ethiopia bertujuan merealisasikan pembangunan infrastruktur dan modernisasi pertanian dalam skala masif untuk meningkatkan taraf sosial-ekonomi penduduk. Kunci utama dari strategi pembangunan nasional ini adalah dengan merelokasi 1,5 juta penduduk yang bermukim

⁷ Oakland Institute, *Development Aid to Ethiopia: Overlooking Violence, Marginalization, and Political Repression*, OI, Oakland CA, 2013, hal.12-16.

tersebar di kawasan yang ditargetkan untuk industri perkebunan menuju pemukiman baru. Kebijakan relokasi penduduk itu disebut dengan nama program “*Villagization*”.⁸

Dengan dirancangnya program *Villagization*, pemerintah Ethiopia berusaha mengumpulkan penduduk yang tersebar di berbagai daerah dalam sebuah pemukiman baru. Program ini berlangsung di empat provinsi, diantaranya adalah Gambella, Afar, Somali, dan Benishangul-Gumuz. Kemudian selama pelaksanaan, menyusul satu provinsi yang terkena program *Villagization* yaitu *Southern Nations Nationalities and Peoples’ Regional State* (SNNPR). Keempat provinsi itu mewakili jumlah sekitar 1,5 juta penduduk yang direlokasi, dengan target pemerintah yaitu 500.000 penduduk dari Somali, 500.000 penduduk dari Afar, 225.000 penduduk dari Benishangul-Gumuz, dan 225.000 penduduk dari Gambella. Relokasi di Afar dan Somali direncanakan selesai dalam kurun waktu satu tahun. Sedangkan relokasi di provinsi Benishangul-Gumuz dan Gambella direncanakan berjalan selama tiga tahun.⁹

Dibawah program *Villagization*, relokasi penduduk dimulai pada pertengahan tahun 2010. Kemudian dibawah rencana pemerintah provinsi Gambella, 45.000 rumah tangga akan direlokasi selama 3 tahun program ini berjalan. Pemerintah juga menyatakan bahwa program *Villagization* dilakukan secara sukarela dengan tujuan untuk meningkatkan akses

⁸ *Ibid.*, hal.1.

⁹ William Davison, “*Ethiopia plans ambitious resettlement of people buffeted by East Africa drought*,” CS Monitor, diakses dari <http://www.csmonitor.com/World/Africa/2011/0801/Ethiopia-plans-ambitious-resettlement-of-people-buffed-by-East-Africa-drought>, pada tanggal 21 Mei 2016.

terhadap layanan dasar dan ketahanan pangan (*food security*), serta mendorong munculnya transformasi sosio-ekonomi dan kultural pada masyarakat.¹⁰

Pemerintah mencanangkan program *Villagization* berlangsung di seluruh distrik di provinsi Gambella, dengan cara memindahkan penduduk dari pemukiman yang tersebar – baik penduduk dengan mata pencaharian bertani di lahan basah, ladang berpindah, atau agro-pastoral – ke sebuah pemukiman baru. Pemukiman baru itu disebut akan menyediakan beberapa infrastruktur baru, diantaranya 19 Sekolah Dasar, 25 klinik kesehatan, 51 saluran irigasi, 41 pabrik penggilingan, 18 klinik hewan, 195 km jalan pedesaan, dan 49 gudang atau fasilitas penyimpanan. Dengan adanya program ini, pemerintah mengumpulkan seluruh penduduk suku Anuak, Nuer, dan suku-suku lainnya (tidak termasuk pengungsi Sudan Selatan) dalam pemukiman-pemukiman baru yang berisi 500 sampai 600 rumah tangga dengan masing-masing rumah tangga akan dapat mengakses lahan seluas 3-4 hektar untuk pertanian.¹¹

Indikator keberhasilan program *Villagization* secara teknis telah dirancang dalam “*Good Practice Guidelines and Principles Regarding Resettlement*” oleh rekan pembangunan Ethiopia yang tergabung dalam *Development Assistance Group* (DAG) – termasuk diantaranya USAID – yang menyebutkan bahwa terdapat empat aspek teknis yang perlu dipenuhi sejak awal perancangan rencana pembangunan hingga pelaksanaannya.

¹⁰ Gambella Peoples’ National Regional State, *Villagization Program Action Plan (2003 EFY)*, 2002 (Kalender Ethiopia 2002, Kalender Gregorian 2010), hal.1.

¹¹ *Ibid.*, hal.1-3.

Aspek pertama yaitu perlunya pemerintah Ethiopia berkonsultasi dan memberi informasi sejelas-jelasnya pada penduduk untuk dapat mengakomodasi keinginan penduduk. Kedua terkait dengan perencanaan rancangan *Villagization*, DAG menuntut adanya partisipasi penuh dari penduduk yang akan direlokasi. Selanjutnya yang ketiga adalah diselesaikannya pembangunan infrastruktur dan layanan sosial dasar di pemukiman baru sebelum relokasi berlangsung. Keempat adalah diberlakukannya mekanisme pemantauan, pengamanan, pengajuan banding, dan pemulihan (kompensasi) selama *Villagization*, supaya program dijalankan sesuai perencanaannya dan dapat melindungi hak-hak penduduk yang direlokasi.¹²

Selain hal teknis tersebut, indikator keberhasilan *Villagization* diukur dari lima aspek sosial ekonomi. Pertama adalah peningkatan kemampuan sektor agrikultur. Kedua adalah peningkatan peluang transisi mata pencaharian penduduk. Ketiga adalah peningkatan daya saing sektor privat, diantaranya pada bidang finansial, perdagangan, dan kapasitas bisnis. Keempat adalah peningkatan ketahanan dan perlindungan terhadap masalah atau bencana kekeringan dan kelaparan. Kelima, peningkatan status kesehatan dan gizi bagi perempuan dan anak-anak.¹³

Selama implementasinya hingga tahun 2014, pemerintah Ethiopia menyebutkan bahwa program *Villagization* ini berjalan dengan lancar dan

¹² Development Assistance Group, *Good Practice Guidelines and Principles Regarding Resettlement*, 2011, hal.2-3.

¹³ United States Agency for International Development – Ethiopia, *Country Development Cooperation Strategy 2010/2011-2014/2015*, USAID, 2011, hal.15.

sukses, dimana penduduk yang direlokasi telah menikmati manfaat sosial dan ekonomi dari berlangsungnya program ini.¹⁴ Namun demikian, muncul beberapa laporan-laporan yang bertolak belakang dengan pernyataan tersebut. Laporan-laporan itu berasal dari beberapa *non-governmental organizations* (NGOs) dan aktivis pembangunan yang turut mengawasi berlangsungnya program *Villagization* di Ethiopia.

Dalam sebuah laporan berjudul “*Waiting Here for Death*,” *Human Rights Watch* (HRW) mendapati proses relokasi ini jauh dari partisipasi/kesukarelaan masyarakat, dan justru disertai dengan berbagai pelanggaran HAM secara luas. Terjadi pemindahan paksa, penangkapan, pemenjaraan sewenang-wenang, pemukulan, pemerkosaan, serta berbagai tindakan kekerasan seksual lainnya. Disebutkan juga bahwa hak warga untuk mendapatkan pangan, pendidikan, dan hunian yang layak diabaikan oleh pemerintah Ethiopia.¹⁵

Nyikaw Ochalla, seorang aktivis pembangunan dari Gambella juga menyatakan hal serupa dengan HRW. Dalam konferensi internasional di India, ia menyatakan:

“As I stand in front of you, hundreds of thousands of small-scale farmers and pastoralists are being denied access to arable farmland, grazing and water points, and hunting grounds – and at best, they are being turned into day laborers doing back breaking work while living in extreme poverty. The government is moving ahead with its plans for so-called “progress,” which relies on tactics of widespread human rights abuses including harassment, rapes, arbitrary detention and imprisonment without trial,

¹⁴ “*Villagization Program Bearing Fruit, says Addisu*”, WIC, diakses dari <http://www.waltainfo.com/index.php/news/detail/10428>, pada tanggal 7 Juni 2016.

¹⁵ Human Rights Watch, *Waiting Here for Death: Displacement and “Villagization” in Ethiopia’s Gambella Region*, 2012, hal.25.

displacement, increased food security, destitution, and destruction of the environment.”¹⁶

Ditinjau dari laporan-laporan tersebut, program *Villagization* nampaknya gagal mewujudkan transformasi sosial seperti yang diharapkan USAID maupun pemerintah Ethiopia. Transformasi sosial atau tujuan pembangunan sosial seharusnya dapat menciptakan inklusi sosial berupa kesempatan bagi setiap individu atau masyarakat untuk memperoleh hak dan kebutuhan yang paling mendasar perihal pangan, pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan tempat tinggal. Namun inklusi sosial itu nampaknya belum dapat dirasakan oleh penduduk yang terdampak oleh adanya program *Villagization* ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis menentukan rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian sebagai berikut:

“Mengapa bantuan luar negeri USAID gagal mendorong terwujudnya pembangunan sosial di Ethiopia melalui program *Villagization*?”

¹⁶ Nyikaw Ochalla, *Press Conference, Indian-Ethiopian Civil Society Summit on Land Investments*, Oakland Institute, diakses dari <http://www.oaklandinstitute.org/statement-nyikaw-ochalla-director-anywaa-survival-organisation-aso>, pada tanggal 8 Juni 2016.

C. Kerangka Pemikiran

Untuk dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan di atas, maka penulis menggunakan konsep dan teori sebagai berikut:

1. *Weak State*

Dalam sebuah buku berjudul *State-Building*, Francis Fukuyama mengajukan konsep Negara Lemah (*Weak State*) untuk dapat menganalisis kegagalan pembangunan di suatu negara. “Lemah” yang dimaksud oleh Fukuyama mengacu pada kekuatan negara, bukan pada lingkup atau fungsinya. Sehingga negara lemah dapat didefinisikan sebagai negara yang kurang memiliki kemampuan kelembagaan untuk menerapkan dan menjalankan berbagai kebijakan, yang sering kali disebabkan oleh kurangnya legitimasi yang mendasari sistem politik secara keseluruhan.¹⁷ Lemahnya kemampuan kelembagaan tersebut, kemudian berdampak pada tidak berjalannya fungsi-fungsi negara dengan semestinya.

Menurut Fukuyama, fungsi negara sendiri dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu fungsi minimal, fungsi menengah, serta fungsi aktivis. Dalam kaitannya dengan Ethiopia sebagai objek bahasan dalam skripsi ini, fungsi negara akan terfokus pada fungsi minimal sesuai fungsi pemerintahan yang dijalankan pemerintah Ethiopia dalam program *Villagization*. Fungsi minimal akan menekankan pada fungsi negara

¹⁷ Francis Fukuyama, *Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21 (terj.)*, Freedom Institute dan Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hal.124.

dalam menyediakan kebutuhan publik (pertahanan, hukum, dan ketertiban; hak milik pribadi; manajemen makroekonomi; dan kesehatan masyarakat) dan meningkatkan keadilan (melindungi kaum miskin).¹⁸ Pembedaan fungsi ini dapat memfokuskan penulis dalam menganalisa kapasitas negara pada fungsi minimalnya.

Kekuatan (kapasitas) dan lingkup (fungsi) negara pada intinya saling berkaitan guna menganalisis apakah negara itu kuat atau lemah. Negara Lemah akan mudah tergelincir dalam keadaan anarki yang penuh kekacauan. Hingga kemudian semakin menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Dalam keadaan seperti itu, otoritas tidak terlembaga, aturan-aturan hukum hanya menjadi permainan kata-kata dalam teks undang-undang, korupsi semakin menjadi, gerakan separatisme bermunculan, kerusuhan etnis dan rasial meningkat. Semua ini adalah gejala yang biasanya mudah ditemukan dalam ciri negara lemah.¹⁹

Di Ethiopia, proses relokasi – dalam program *Villagization* – diwarnai oleh berbagai macam tindak kekerasan, baik dari penyiksaan sampai pemerkosaan. Penduduk yang telah berpindah juga dilaporkan tidak terpenuhi haknya karena pemukiman baru yang disediakan pemerintah Ethiopia ternyata tidak memiliki infrastruktur dasar maupun pendukung yang layak. Bahkan mayoritas penduduk yang sehari-harinya biasa mencari penghasilan dengan bertani (baik ladang

¹⁸ *Ibid.*, hal.9.

¹⁹ Rizal Mallarangeng, *Mendobrak Sentralisme Ekonomi: Indonesia 1986-1992*, Freedom Institute dan KPG, Jakarta, 2004, hal.xxxi.

berpindah maupun ladang menetap), budidaya ikan di sungai, dan peternakan juga kehilangan mata pencahariannya. Timbulnya masalah-masalah tersebut menunjukkan bahwa kemampuan kelembagaan yang dijalankan pemerintah Ethiopia cukup lemah. Hingga menyebabkan tidak berjalannya fungsi-fungsi minimal negara untuk misalnya menjaga kesejahteraan dan keadilan bagi rakyatnya.

2. Teori *Securitization* (Sekuritisasi)

Dalam teori sekuritisasi, masalah keamanan dipandang sebagai hasil dari sebuah konstruksi. Dinyatakan oleh Barry Buzan bahwa sebuah isu publik dapat direpresentasikan sebagai sebuah ancaman eksistensial (*existential threat*) bagi suatu entitas (*referent objects*) melalui proses diskursif. Proses itu memberi syarat adanya aktor yang mewacanakan sekuritisasi (*securitizing actors*) dan aktor yang dipengaruhi (*audience*).²⁰ Sekuritisasi baru dikatakan berhasil jika audiens telah menyetujui isu yang diwacanakan sebagai ancaman eksistensial dan kemudian mengambil tindakan. Sehingga persetujuan dan tindaklanjut dari audiens sangat tergantung pada seberapa jauh kemampuan aktor sekuritisasi dalam melakukan tindakan sekuritisasi (*speech act*).²¹

Beberapa konsep muncul dalam teori ini, seperti *securitizing actor*, *speech act*, *existential threat*, *referent object*, *audience*, dan *functional*

²⁰ Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, Lynne Rienner Publisher, London, 1998, hal.23-25.

²¹ *Ibid.*, hal.32.

actor. *Securitizing actor* merujuk pada aktor yang memulai dan melakukan sekuritisasi. *Speech act* adalah tindakan keseluruhan aktor dalam rangka melakukan sekuritisasi. *Existential threat* adalah ancaman yang muncul karena diwacanakan oleh aktor sekuritisasi, yang kemudian menjadi isu keamanan. *Referent object* adalah suatu entitas yang akan terancam dengan adanya isu keamanan itu jika tidak benar-benar ditindaklanjuti. Sedangkan *audience* adalah pihak yang coba dipengaruhi oleh aktor sekuritisasi agar mempercayai adanya ancaman dan menindaklanjuti. Dalam beberapa kasus juga muncul *functional actor* yang secara signifikan sangat mempengaruhi dinamika perkembangan isu keamanan tersebut.²²

Terkait dengan penelitian ini, sekuritisasi terjadi pada isu-isu sosial seperti kelangkaan pangan, kelaparan, kemiskinan, dan stabilitas regional. Aktor yang melakukan sekuritisasi adalah pemerintah AS bersama USAID, sedangkan audiensnya adalah Ethiopia. Ancaman eksistensial berkaitan dengan ancaman terorisme yang dapat muncul dari masalah-masalah sosial yang terjadi di Ethiopia. Entitas yang keamanannya dapat terancam dari adanya masalah tersebut adalah AS, Ethiopia, dan negara-negara yang berada di Kawasan Tanduk Afrika. Sedangkan *speech act* meliputi program pembangunan Ethiopia yang ditujukan untuk mengatasi masalah-masalah sosial yaitu *Villagization*.

²² *Ibid.*, hal.36.

Selain itu juga terdapat kelompok teroris Al-Shabaab sebagai *functional actor*.

Sekuritisasi dianggap cukup mempengaruhi bagaimana bantuan luar negeri disalurkan dan bagaimana bantuan luar negeri berperan dalam program yang didanai. Seperti halnya di Ethiopia ini, sekuritisasi nampak mengakibatkan program *Villagization* gagal menggapai pembangunan sosial. Akibat sekuritisasi, USAID menjadi lebih terfokus pada isu keamanan untuk segera mengumpulkan penduduk dalam pemukiman terpusat – daripada mengawal tujuan pembangunan sosial – yang kemudian menyebabkan terjadinya pengabaian terhadap implementasi *Villagization* yang sarat dengan intimidasi dan represi oleh pemerintah Ethiopia. Bahkan, USAID juga mengabaikan bantuannya yang tidak disalurkan secara semestinya dimana infrastruktur dan fasilitas-fasilitas yang seharusnya diberikan untuk penduduk terdampak *Villagization* tidak diberikan. Dari pengabaian-pengabaian semacam ini, penduduk yang seharusnya dapat terlepas dari jerat kemiskinan dan kelaparan nampaknya masih terkungkung dalam kondisi sosial-ekonomi yang buruk meskipun program *Villagization* telah selesai diselenggarakan.

D. Hipotesa

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, kemudian dapat ditarik jawaban sementara atas rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Secara internal, kegagalan pembangunan sosial di Ethiopia disebabkan oleh lemahnya kemampuan kelembagaan (*weak state*) pemerintah Ethiopia sehingga menyebabkan tidak berjalannya fungsi minimal negara dalam menyediakan kebutuhan publik dan menciptakan keadilan. Kelemahan kemampuan kelembagaan itu nampak dalam perumusan dan pelaksanaan program *Villagization*, serta dalam penegakan hukum yang berlaku.
2. Secara eksternal, kegagalan pembangunan sosial di Ethiopia disebabkan oleh terjadinya sekuritisasi dalam penyaluran bantuan USAID ke Ethiopia. Sehingga mengakibatkan pengabaian oleh USAID pada proses implementasi *Villagization* yang serampangan oleh pemerintah Ethiopia.

E. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dalam penulisan skripsi ini meliputi periode berlangsungnya program *Villagization* di Ethiopia. Serta periode dimana bantuan luar negeri USAID berperan dalam mendukung terealisasinya program pembangunan ini. Sehingga ditentukan jangkauan penelitian dari skripsi ini adalah pada awal tahun anggaran 2010/2011 hingga akhir tahun anggaran 2013/2014. Akan tetapi penulis tidak menutup kemungkinan untuk memuat data-data yang relevan dari tahun-tahun sebelum maupun sesudah program *Villagization* berlangsung.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Dalam penelitian deskriptif, penulis meneliti status obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, dan satu kelas peristiwa. Metode ini merupakan metode pencarian dengan tujuan membuat deskripsi atau gambaran yang sistematis, faktual, akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena-fenomena yang diselidiki.²³

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada data sekunder. Data sekunder merupakan data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat otentik. Data ini diperoleh dari tangan ke dua, ketiga, dan seterusnya. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen, buku, jurnal ilmiah, arsip, atau berita surat kabar cetak maupun internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

²³ Whitney, dalam Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, Hal.56-57.

Penelitian yang mengacu pada jenis sumber data sekunder, maka penelitian akan menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan. Sesuai dengan penggunaan data sekunder, maka pencarian data dalam penulisan penelitian ini difokuskan pada data-data pustaka. Data pustaka akan penulis seleksi, kemudian menganalisis bahan-bahan pustaka tersebut dan dipisahkan sesuai dengan yang memiliki korelasi dengan judul penelitian.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari penelitian akan disusun secara sistematis dan logis, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Seperti menurut Bodgan, penelitian kualitatif sebagai sebuah prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau bisa dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁴

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan pendahuluan dalam penyusunan skripsi ini yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka berpikir, hipotesa, jangkauan penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan

BAB II Kerjasama USAID dan Pemerintah Ethiopia

²⁴ Bodgan dan Taylor, dalam Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1989. Hal.3.

Bab ini menguraikan latar belakang USAID dan latar belakang Ethiopia serta problem-problem sosialnya. Selain itu juga diuraikan perihal kerjasama yang telah terjalin antara USAID dan pemerintah Ethiopia, baik dalam konteks masa lampau maupun masa sekarang

BAB III Pembangunan Ethiopia dalam Skema *Villagization*

Bab ini menguraikan proses pembangunan di Ethiopia dalam skema program *Villagization* pada tahun 2010 hingga 2014, namun juga akan diuraikan sebuah tinjauan historis mengenai program *Villagization* yang awalnya pernah dijalankan pada tahun 1985. Selain itu, bab ini juga menguraikan perihal kapasitas kelembagaan pemerintah Ethiopia dan peran USAID dalam program *Villagization*.

BAB IV Kegagalan Program *Villagization* di Ethiopia

Bab ini menguraikan tentang faktor-faktor yang menyebabkan bantuan luar negeri dari USAID gagal mendorong terciptanya pembangunan sosial dalam program *Villagization* di Ethiopia. Untuk menjelaskan kegagalan secara lebih lanjut, akan dikaitkan antara permasalahan internal selama implementasi program pembangunan dan permasalahan eksternal yang dibawa oleh bantuan luar negeri yang memiliki peranan penting atas berlangsungnya program pembangunan di Ethiopia.

BAB V Kesimpulan

Bab ini menguraikan kesimpulan dari keseluruhan hasil dari penelitian skripsi ini.